

343,207

Bac

P. C. 1

**PTIK: MASA LAMPAU DAN
MASA AKAN DATANG**

**PIDATO PERAYAAN HARI JADI KE-35
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**



JAKARTA : PTIK

17 JUNI 1981

PTIK : MASA LAMPAU DAN MASA AKAN DATANG

Pidato Perayaan Hari Jadi Ke-35 Dari

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,

Kepolisian Republik Indonesia,

Jakarta, 17 Juni 1981

Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Yang terhormat sekalian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-Saudarâ yang berkenan ikut memeriahkan perayaan hari jadi ke-35 dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang diadakan pagi ini.

Pendidikan calon-calon pemimpin dalam bidang kepolisian di negeri kita, Indonesia, boleh dikatakan dimulai dengan suatu kursus-dua-tahun buat calon-calon Komisaris Polisi yang diselenggarakan di serambi belakang Kantor Pusat Kepolisian (Hoofdbureau van Politie) di Jakarta pada tahun 1914. Jumlah para peserta kursus pada waktu itu sangat kecil; mereka terdiri dari hanya 6 orang.¹⁾

Empat windu sesudah pembukaan kursus pertama itu, yaitu pada tanggal 17 Juni 1946, Pimpinan Negara Republik Indonesia, negara yang baru

- 1) Lihat 'Het 25-jarig jubileum van de Opleidingschool voor de Politie in Nederlandsch-Indie' (Perayaan hari jadi ke-25 dari Sekolah Pendidikan Untuk Polisi di Hindia Belanda), *De Nederlandsch-Indische Politiegids*, Tahun XXIII, No. 11 (November 1939), hlm. 242. Majalah bulanan *De Nederlandsch-Indische Politiegids* (Pedoman Polisi Hindia Belanda) diterbitkan oleh Vereeniging van Hoogere Politie Ambtenaren (Perhimpunan Pegawai-Pegawai Tinggi Kepolisian) dan merupakan sumber yang kaya keterangan tentang masalah-masalah kepolisian di Indonesia pada akhir masa jajahan Hindia Belanda. Majalah tersebut juga memberikan gambaran yang jelas tentang pengetahuan Ilmu Kepolisian di Indonesia dalam masa yang bersangkutan. Sebenarnya, pada waktu itu juga terdapat majalah bulanan *De Politie* (Polisi), yang diterbitkan oleh Vereeniging van Inspecteurs van Politie in Nederlandsch Indie (Perhimpunan Inspektur Polisi di Hindia Belanda) sejak 1917, serta majalah *Justitie en Politie: tijdschrift voor Bestuurs-Justitie en Politieambtenaren, zoomede voor ambtenaren der Provincien, Gemeenten en Regentschappen* (Kehakiman dan Polisi: majalah untuk pegawai-pegawai Kehakiman Pamong Praja dan Polisi, serta juga pegawai-pegawai Provinsi, Kotapraja dan Kabupaten). Sayangnya, sekarang ini majalah-majalah profesi dalam bidang Ilmu Kepolisian di Indonesia tidak ada lagi, suatu kemunduran yang besar dan perlu selekas mungkin diperbaiki kembali.

berdiri selama beberapa bulan saja, bersama dengan Pimpinan Kepolisian Negara berkumpul di Mertoyudan, Magelang, dan dengan resmi membuka perguruan tinggi yang pada waktu itu dinamakan Akademi Polisi dan sekarang sebagian bernama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.²⁾

Pada permulaan masa kemerdekaan kita, Pimpinan Negara dan Pimpinan Kepolisian sudah menanggapi masa depan kepolisian kita dengan pandangan maju yang sangat jauh. Pada waktu itu, lebih dari 35 tahun yang lalu, mereka sudah menyadari keharusan untuk menaikkan tingkat pengetahuan kepolisian di negara kita dengan mengusahakan pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Kepolisian, pendidikan tinggi yang mutunya harus paling sedikit sama dengan mutu pendidikan tinggi dalam bidang-bidang pengetahuan keahlian yang dikembangkan di universitas, seperti Pengetahuan Hukum, Ilmu Pertanian, Ilmu Ekonomi, atau Ilmu Kedokteran.

Negara besar, seperti negara kita, menuntut kehadiran kepolisian yang berkemampuan tinggi, sedangkan kemampuan tinggi hanya bisa terwujud bila mana para pemimpinnya memiliki pengetahuan pada taraf yang tinggi. Pengetahuan demikian bagi orang-orang yang berbakat bisa diperoleh atas dasar pengalaman dan usaha belajar sendiri, tapi tentu lebih mudah bisa diperoleh dari program-program pendidikan tinggi yang sengaja diadakan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah dikembangkan dan disajikan secara beraturan dalam kepastakaan Ilmu Kepolisian.

Ruang lingkup kehidupan yang dahulu seolah-olah terbatas pada pedesaan tertentu, perkotaan tertentu, ataupun daerah tertentu saja, seolah-olah tak berhubungan dengan daerah-daerah lain, semakin lama semakin terkait dalam jaringan kehidupan yang meliputi sekalian penduduk di kepulauan kita yang amat luas ini. Kenyataan demikian menuntut wawasan pemimpin-pemimpin kepolisian yang tidak lagi hanya terbatas pada satu kota atau satu daerah saja, melainkan menuntut wawasan yang jauh lebih luas. Pengetahuan keahlian yang diperlukan oleh para pemimpin dalam bidang kepolisian tidak

2) Lihat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian : 25 tahun pengabdian (Jakarta: P.T.I.K., 1971), hlm. 25. Akademi Polisi ganti nama menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tanggal 3 Juni 1953. Pada akhir tahun 1965, sebagian, yaitu program pendidikan tingkat-tingkat pertama, dipisahkan dari PTIK dan menjadi Akademi Kepolisian di Sukabumi. Akademi Kepolisian ini kemudian, dalam tahun 1968, menjadi bagian dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Bagian Kepolisian (AKABRI POL) dan dipindahkan dari Sukabumi ke Semarang.

lagi terbatas pada pengetahuan yang cukup tepat-guna pada permulaan abad kita ini, dalam masa tahun-tahun 1920-an, dalam masa tahun-tahun 1930-an, ataupun dalam masa tahun-tahun 1940-an, melainkan merupakan pengetahuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan, tugas-kewajiban, dalam masyarakat Indonesia tahun-tahun 1980-an, tahun-tahun 1990-an, bahkan permulaan abad yang akan datang, abad ke-XXI.

35 tahun yang lalu, sebagai pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh besar, Pimpinan Negara dan Pimpinan Kepolisian telah sadar, bahwa pengetahuan keahlian para pemimpin, dan oleh sebab itu juga para anggauta bawahannya, dari kepolisian di Republik Indonesia yang telah bebas merdeka tidak bisa sama tarafnya dengan taraf pengetahuan keahlian pemimpin-pemimpin kepolisian dalam masa jajahan Hindia Belanda. Pengetahuan keahlian para pemimpin kepolisian di satu negara merdeka yang besar, jaya dan agung, seperti Republik Indonesia, harus lebih tinggi daripada pengetahuan para pemimpin kepolisian suatu tanah jajahan.

Sekarang, 35 tahun sesudah peristiwa bersejarah dan bermakna tinggi bagi kepolisian kita terjadi di Mertoyudan, Magelang, kita harus tinjau kembali pendidikan calon-calon pemimpin kepolisian kita sebagaimana dijumpai di PTIK. Kalau para pemimpin yang mendirikan PTIK kita ini berkeyakinan bahwa pengetahuan keahlian dalam bidang kepolisian di negara kita dalam tahun-tahun akhir 1940-an dan 1950-an harus lebih tinggi tarafnya, daripada pengetahuan keahlian dalam masa tahun-tahun 1920-an, 1930-an, dan permulaan 1940-an, maka mestinya pengetahuan yang diajarkan di PTIK kita sekarang ini juga harus lebih tinggi tarafnya, daripada pengetahuan keahlian dalam tahun-tahun 1950-an, 1960-an, malah 1970-an.

Tentu saja dengan ungkapan 'lebih tinggi' tidak dimaksud pemikiran-pemikiran yang lebih menjulang tinggi ke langit imajinasi, melainkan yang dimaksud adalah kadar ilmiah yang lebih tinggi. Pengetahuan yang disajikan kepada para mahasiswa, calon-calon pemimpin, harus lebih mendekati kenyataan-kenyataan di negeri kita sendiri, meskipun juga terwujud sebagai generalisasi-generalisasi, teori-teori, ataupun sistim teori pada tingkat yang lebih tinggi. Generalisasi-generalisasi, teori-teori dan sistem teori yang meru-

pakan bagian dari pengetahuan Ilmu Kepolisian ini harus tetap, senantiasa, didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang bersangkutan.³⁾

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-Saudara yang saya hormati.

Perkenankanlah saya memanfaatkan pertemuan perayaan kita sekarang ini untuk sejenak mengarahkan perhatian pada tiga permasalahan yang, menurut hemat saya, menuntut perhatian kita semua, meskipun permasalahan-permasalahan ini sama sekali tidak merupakan sesuatu yang baru dan, saya yakin, sudah-diketahui oleh banyak di antara para hadirin yang terhormat.

Ketiga masalah ini ialah, pertama, masalah penggunaan bahasa nasional, bahasa Indonesia, dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Kepolisian; kedua, masalah ruang lingkup bidang pengetahuan Ilmu Kepolisian; dan, ketiga, masalah pemanfaatan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri dalam pengembangan pendidikan tinggi di PTIK.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-Saudara yang saya hormati.

Ketika 35 tahun yang lalu perguruan tinggi yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dibuka di Magelang, bahasa kaum terpelajar, termasuk bahasa tokoh-tokoh nasional kita seperti Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, adalah bahasa Belanda. Pada waktu itu banyak di antara orang-orang terpelajar lulusan perguruan tinggi di tanah air kita juga mengerti bahasa Jerman, Perancis dan Inggris, sehingga pada waktu itu kaum terpelajar kita ini cenderung berfikir dan berbicara dalam bahasa Belanda, yang sering dibubuhi dengan istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan bahasa asing lain,

- 3) Hubungan antara kenyataan dan teori cukup rumit, apa lagi dalam lapangan ilmu-ilmu sosial di mana sifat pengetahuan tentu berbeda daripada pengetahuan dalam lapangan ilmu-ilmu alamiah. Lihat, misalnya, Ernest Nagel, *The Structure of Science: problems in the logic of scientific explanation* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1961); Abraham Kaplan, *The Conduct of Inquiry: methodology for behavioral science* (Scranton, Penn.: Chandler Publishing Company, 1964); Pitirim A. Sorokin, *Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences* (Chicago: Henry Regnery Co., 1965); Gordon J. Drenzo, ed., *Concepts, Theory, and Explanation in the Behavioral Sciences* (New York: Random House, 1966); Ernest Gellner, *Cause and Meaning in the Social Sciences* (London: Routledge and Kegan Paul, 1973); dan Richard H. Brown, *A Poetic for Sociology: toward a logic of discovery for the human sciences* (New York: Cambridge University Press, 1977).

seperti bahasa Jerman, Perancis dan Ingeris. Gejala ini tidak dapat kita ingkari dan merupakan akibat perkembangan masyarakat yang tidak dapat dihindari oleh para kaum terpelajar ini.

Maka, adalah lumrah bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 para pemikir yang menghasilkan naskah yang agung ini merasa perlu menggunakan istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan Ingeris. Mereka menggunakan bahasa-bahasa asing ini agar supaya para pembaca, terutama kaum terpelajar, yang lebih menguasai bahasa-bahasa asing ini daripada bahasa Indonesia, lebih dapat mengerti istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar kita. Untuk menjelaskan kepada para kaum terpelajar apa yang dimaksud dengan istilah 'kekuasaan' mereka merasa perlu mencantumkan kata 'power' dalam bahasa Ingeris. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ungkapan 'anggaran pendapatan dan belanja negara' mereka merasa perlu mencantumkan ungkapan bahasa Belanda 'staatsbegroting.' Dan demikian seterusnya.⁴⁾

Penguasaan bahasa asing yang lebih — bagi sejumlah orang terpelajar malah jauh lebih — daripada penguasaan bahasa Indonesia tercermin dengan sangat jelas juga pada kuliah-kuliah yang diberikan oleh kaum terpelajar kita di perguruan-perguruan tinggi kita pada waktu itu, termasuk juga kuliah-kuliah di PTIK. Gejala penggunaan bahasa asing dalam perkuliahan pada masa itu harus kita anggap sebagai gejala masa peralihan, bukan sebagai tradisi akademik yang harus dipertahankan.

Akan tetapi, rupa-rupanya masa peralihan dari masa penggunaan bahasa Indonesia yang tercermar oleh penggunaan banyak istilah dan ungkapan dalam bahasa-bahasa asing ke masa penggunaan bahasa nasional dalam arti yang sesungguhnya memerlukan waktu yang lebih lama daripada semestinya. Malah, bilamana dalam tahun-tahun 1950-an cenderung digunakan banyak ungkapan dalam bahasa Belanda dan Jerman, sekarang terjadi peralihan ke penggunaan bahasa Ingeris, tapi sama saja bahasa asing.

4) Lihat 'Penjelasan tentang Undnag-Undang Dasar Negara Indonesia' dalam Undang-Undang Dasar; Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Garis-Garis Besar Haluan Negara (Jakarta: Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, t.t.), hlm. 10-21.

Istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan bahasa asing ini sering ditampilkan sebagai sesuatu yang lebih penting daripada istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan dalam bahasa nasional kita sendiri.⁵⁾ Alasan yang seringkali diajukan didasarkan atas anggapan bahwa istilah atau ungkapan bahasa asing yang bersangkutan memberikan arti yang lebih tepat daripada istilah atau ungkapan bahasa Indonesia, pada hal arti yang dapat diberikan pada suatu istilah asing tertentu, biasanya tidak hanya satu, melainkan banyak. Istilah 'Macht' dalam bahasa Jerman saja, misalnya, terkait pada banyak rumusan arti yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa kita anggap bahwa penggunaan kata 'Macht' adalah lebih tepat mencerminkan arti tertentu daripada istilah 'kekuasaan' dalam bahasa Indonesia diuraikan secara terperinci, sehingga jelas batas-batas gejala yang diartikan dengan istilah yang bersangkutan, daripada menggunakan salah satu istilah dari bahasa asing. Hal ini juga merupakan cara berkomunikasi yang lebih baik mengingat bahwa, berlainan daripada para mahasiswa dan kaum terpelajar dalam tahun-tahun 1950-an, mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini tidak menguasai bahasa Belanda, Jerman, Perancis, bahkan Inggris.

Oleh sebab itu, berlainan daripada fungsinya dalam tahun-tahun 1950-an, penggunaan bahasa asing tidak memperjelas, melainkan menambah kabur hal-hwal yang diharapkan dapat diketahui oleh para mahasiswa. Bilamana seorang pengajar menggunakan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan utama dalam pembahasannya, apa lagi tanpa memberikan cukup penjelasan mengenai arti istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan bahasa asing yang bersangkutan, banyak bagian dari uraian pembahasannya sukar atau malah sama sekali tidak bisa dimengerti oleh para mahasiswa yang menjadi sasaran kegiatan-kegiatan pendidikannya, mahasiswa-mahasiswa yang justru diharapkan dapat mengerti apa yang diuraikannya.

Lebih daripada setengah abad yang lalu, sejumlah pemuda dari berbagai daerah di kepulauan kita menyatakan tekad untuk berbahasa satu. Pada 'Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia' Kedua, yang diadakan di Jalan Kramat 106 di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka bertekad bahwa bahasa Indonesia harus dijadikan dan dikembangkan sebagai bahasa nasional kita. Tekad mereka, yang diambil-alih oleh paling sedikit sekalian warga ne-

5) Lihat contoh-contoh yang diberikan dalam Harsja W. Bachtiar, 'Penggunaan bahasa kita oleh kaum tjendekiawan,' *Intisari*, No. 44 (Maret 1967), hlm. 108-113.

gara kita yang memperjuangkan negara kesatuan Indonesia, juga berarti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Ilmu Kepolisian di negeri kita, kita perlu mengembangkan penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita dalam bidang kepolisian. Mestinya kita sudah lama tidak menggunakan bahasa Belanda lagi dalam perkuliahan, tulisan, rapat, seminar dan pertemuan-pertemuan lain di mana sebagian besar peserta tidak mengerti bahasa Belanda. Hal yang sama berlaku juga bagi penggunaan bahasa Jerman, Perancis, atau Inggris. Sampai belum lama berselang, di PTIK masih terdapat mata-mata kuliah dengan nama yang dinyatakan dalam bahasa Inggris, malah tanpa nama dalam bahasa nasional kita sendiri, bahasa Indonesia.

Oleh sebab itu perlu diadakan usaha yang serius untuk menetapkan istilah-istilah bahasa Indonesia dalam bidang Ilmu Kepolisian dan mengusahakan penulisan karya-karya ilmiah dalam bidang Ilmu Kepolisian dalam bahasa nasional kita, serta penterjemahan dan penyaduran karya-karya ilmiah yang tertulis dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, dengan memberikan prioritas pada bahan-bahan pengkajian yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Ilmu Kepolisian.

Permasalahan kedua yang hendak dijadikan sasaran perhatian dalam uraian ini ialah masalah ruang lingkup bidang pengetahuan Ilmu Kepolisian. Pengangkatan seseorang dalam bidang Sosiologi sebagai Dekan PTIK mengakibatkan berbagai orang mengira bahwa sekarang terjadi pergeseran dari pengutamaan perhatian pada pengetahuan hukum ke pengutamaan perhatian pada ilmu-ilmu sosial. Gambaran demikian tidak benar. Bukanlah perubahan pengutamaan perhatian yang sedang diusahakan sekarang ini. Usaha yang sekarang sedang dikembangkan ialah usaha perluasan ruang lingkup perhatian bersamaan dengan usaha pengintegrasian berbagai macam pengetahuan secara lebih baik.

Di PTIK sedang diusahakan pengembangan program-program pendidikan dan program-program pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Kepolisian yang amat banyak cabang-cabangnya dan bidang-bidang bantuannya. Ilmu Kepolisian tidak hanya mencakup pengetahuan Hukum Kepolisian, serta Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana; Ilmu Kepolisian tidak hanya mencakup Ilmu Manajemen Kepolisian dan Administrasi Kepolisian; Ilmu Kepolisian tidak hanya mencakup pengetahuan Sosiologi, terutama berkenaan dengan masalah-masalah kepolisian; Ilmu Kepolisian tidak

* hanya mencakup Kriminalistik dan Kriminologi; melainkan juga mencakup berbagai bidang pengetahuan budaya, seperti pengetahuan Sejarah dan Filsafah Kepolisian, serta pengetahuan teknologi, Teknologi Kepolisian. Bidang keahlian yang akhir ini, Teknologi Kepolisian,⁶⁾ adalah suatu bidang pengetahuan yang agak terabaikan dalam masa lampau, pada hal adalah amat penting untuk masa sekarang dan masa akan datang.

Dengan lain perkataan, Ilmu Kepolisian, yang harus dijadikan sasaran perhatian dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan dan kegiatan-kegiatan penelitian di PTIK, merupakan bidang-bidang pengetahuan yang banyak ragamnya, meliputi ilmu-ilmu alamiah dan teknologi, ilmu-ilmu sosial maupun pengetahuan budaya.

Hal ini tidak berarti bahwa setiap perwira kepolisian harus menguasai sekalian cabang Ilmu Kepolisian yang ada. Hal demikian tidak mungkin, tapi hal ini berarti bahwa dalam kepolisian kita sebagai keseluruhan harus ada ahli-ahli dalam masing-masing cabang Ilmu Kepolisian ini; tidak hanya satu-dua ahli untuk masing-masing bidang pengetahuan keahlian melainkan banyak ahli. Kita memerlukan ahli-ahli lalu-lintas, ahli-ahli penyidikan kejahatan, ahli-ahli manajemen kepolisian, ahli-ahli pembuktian, ahli-ahli intelijen, ahli-ahli kimia forensik, ahli-ahli kedokteran atau patologi forensik, ahli-ahli fisika forensik, ahli-ahli sejarah kepolisian, ahli-ahli psikologi kepolisian, ahli-ahli psikiatri kepolisian, ahli-ahli antropologi hukum, ahli-ahli hukum kepolisian, penerbang-penerbang kepolisian, ahli-ahli komunikasi kepolisian, ahli-ahli teknologi kepolisian, dan berbagai jenis ahli lain, yang masing-masing memerlukan pengetahuan keahlian tersendiri dan ketrampilan tersendiri. Tentu saja tidak semua ahli-ahli ini memerlukan wewenang kepolisian, meskipun mereka bekerja sebagai anggota-anggota POLRI. Ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak menuntut wewenang demikian.

6) Berkenaan dengan masalah-masalah teknologi kepolisian, lihat, misalnya, Institute for Defense Analyses, **Task Force Report: Science and Technology** (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1967); S.I. Cohen, ed., **Law Enforcement Science and Technology**, Jilid II (Chicago: Research Institute of the Illinois Institute of Technology, 1968); S.I. Cohen dan W.B. MacMahon, ed., **Law Enforcement Science and Technology**, Jilid III (Chicago: Research Institute of the Illinois Institute of Technology, 1970); C.L. Cronkhite, **Automation and Law Enforcement** (Springfield, Ill. : Charles C. Thomas, Publisher, 1974); Kent W. Colton, **Police Computer Technology: implementation and impact** (Lexington, Mass.: Lexington Books, D.C. Heath and Co., 1977); dan V.A. Leonard, **The New Police Technology: impact of the computer and automation on police staff and line performance** (Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, Publisher, 1980).

PTIK harus ikut serta menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang berbagai jenis ini, sebab bilamana PTIK hanya menghasilkan satu jenis tenaga ahli, seperti dilakukannya selama ini, para ahli demikian tidak mungkin ahli dalam cabang manapun dari Ilmu Kepolisian ini, karena waktu singkat yang tersedia untuk pendidikannya digunakan untuk usaha menguasai pengetahuan mengenai segala sesuatu serba sedikit. Tanpa ahli-ahli yang berbagai jenis sukar sekali kepolisian kita bisa berkembang maju, memenuhi tuntutan masyarakat kita yang makin lama makin modern, terlepas daripada apakah kita setuju atau tidak setuju dengan perkembangan demikian.

Masalah ketiga yang hendak dikemukakan di sini ialah masalah pemanfaatan perguruan-perguruan tinggi dan pusat-pusat ilmu pengetahuan Ilmu Kepolisian lain di luar negeri.

Pendidikan tinggi di PTIK sendiri sukar dapat dikembangkan dengan cepat tanpa pemanfaatan perguruan-perguruan tinggi dalam Ilmu Kepolisian yang lebih maju di luar negeri.

Dalam usaha memperkuat Angkatan Darat republik kita ini, TNI Angkatan Darat mengembangkan pengetahuan keahlian para perwira utamanya dengan memanfaatkan perguruan-perguruan tinggi kemiliteran yang terbaik di dunia ini. Angkatan Darat kita menugaskan banyak perwira untuk berusaha memperoleh pengetahuan keahlian dan ketrampilan tambahan di perguruan-perguruan tinggi luar negeri, seperti Command and General Staff College di Amerika Serikat; Defence Service Staff College di India; Staff College di Pakistan; Hogere Krijgsschool di Nederland; malah juga Taktika Skola di Yugoslavia dan Waenaya Akademia M.W. Frunze di Uni Soviet.

Pada pertengahan tahun-tahun 1960-an, sudah ada lebih dari 50 perwira TNI-AD yang pernah belajar, biasanya lebih dari satu tahun, di Command and General Staff College di Fort Leavenworth di Amerika Serikat, termasuk perwira-perwira Kartakusuma, Yani, Surono, Mokoginta, Tirtosudiro, Suwanto, Darjatmo, Muskita, Jonosewojo, Kartidjo, Charis Suhud, Sutopo Juwono, Achmad Wiranatakusumah, Pandjaitan dan Widjojo Sujono; sudah ada lebih dari 20 perwira TNI-AD yang pernah belajar di Defence Service Staff College di India, termasuk perwira-perwira Alibasjah Satari, Harun Sohar, Muhammad Jasin, Sobiran, Brotosewojo, Makmun Murod, Sutanto Wirjoprasonto, Tjokropranolo dan Saṭibi Darwis; sudah ada lebih dari selusin perwira TNI-AD yang pernah belajar di Staff College di Quetta, Pakistan,

termasuk perwira-perwira Suadi Suromihardjo, Leo Lopulisa, Dandi Kadar-san, Hafiluddin, Julius Henuhili, Djamin Gintings, dan Umar Said; sudah ada 24 perwira TNI-AD yang pernah belajar di Waenaya Akademia M.W. Frunze di Moskow, Uni Soviet, termasuk perwira-perwira Sumrahadi, Iljas Wahono, Slamet Danudirjo, Susilo Sudarman, Wing Wirjawan, dan Ely Soengkono.

Pada pertengahan tahun-tahun 1960-an, TNI-AD juga telah mengirim 4 perwira ke Hogere Krijgsschool di Den Haag, Nederland, termasuk perwira-perwira Tjakradipura dan Dharsono; 4 perwira dengan tugas belajar ke Australian Staff College di Queenscliff, Victoria, Australia, yaitu perwira-perwira Tambunan, Witono Sarsarto, Rais Abin, dan Sarwo Edhie Wibowo; 5 perwira dengan tugas belajar ke Taktika Skola di Beograd, Yugoslavia, termasuk perwira-perwira Hasnan Habib dan Sudarmadi; 1 perwira dengan tugas belajar ke General Stabs Lehrgang der Fuhrungsakademie der Bundeswehr Abteilung di Hamburg, Jerman, yaitu perwira Soemitro; serta 4 perwira dengan tugas belajar ke Staff College di Camberley, Inggris, termasuk perwira Hartawan Wirjodiprodo dan Asnawi Mangku Alam.

Bahwa sekalian perwira ini ditugaskan belajar pada perguruan-perguruan tinggi di berbagai negara asing tidak berarti bahwa pendidikan yang diberikan di dalam negeri kurang baik dibanding dengan pendidikan yang diberikan di luar negeri. SESKOAD di negeri kita sendiri juga menghasilkan perwira-perwira yang memiliki kemampuan kemiliteran yang bisa diandalkan, dibanggakan. Pada pertengahan tahun 1964, terdaftar 273 perwira yang dianggap berhak memakai Tanda Kemampuan Staf dan Komando (TKSK), tanda tamat belajar di SESKOAD atau perguruan tinggi militer yang setingkat. Sedikit lebih dari setengah jumlah perwira ini adalah tamatan SESKOAD di Bandung, termasuk perwira-perwira Bambang Supeno, Surjosurarso, Soedirman, Soeharto, Tahir, Askari, Munadi, Sutojo, Amir Machmud, Kusno Utomo, Yoga Sugomo, Alex Prawiraatmadja, Purbosuwondo, Kemal Idris, Abdul Kadir Prawiraatmadja, Wahono, Surjo Wirahadiputro, Panggabean, Ateng Jogasara, Kusno, Ramli, Sarbini, Sokowati, Rukman, dan Poniman.⁷⁾ Perwira-perwira tinggi TNI-AD tamatan SESKOAD ternyata tidak kalah dalam pemikiran maupun kemampuan bertindak jika dibanding dengan perwira-perwira tamatan perguruan tinggi militer di luar negeri.

7) 'Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan Tanda Kemampuan Staf dan Komando,' *Karya Wira Jati*, No. 22 (November 1966), hlm. 76-115.

Akan tetapi, suatu angkatan, seperti juga profesi atau bidang pengetahuan keahlian tertentu, memperoleh manfaat yang lebih besar bilamana ada di antara anggotanya memperoleh pengetahuan keahlian di luar negeri, sehingga angkatan, profesi, atau bidang pengetahuan keahlian yang bersangkutan dapat memanfaatkan sumber pengetahuan yang tidak terbatas pada sumber daya di satu negeri saja, yaitu negeri sendiri, melainkan dapat memanfaatkan sumber pengetahuan dari berbagai negeri. Adanya pengetahuan berbagai jenis dari berbagai sumber pengetahuan biasanya merangsang perkembangan maju dalam angkatan, profesi atau bidang pengetahuan keahlian yang bersangkutan, tentu saja bilamana orang-orang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembuahan silang. Perpaduan pengetahuan yang berbeda sering menghasilkan pengetahuan yang baru, pengetahuan yang biasanya merupakan perwujudan dari kemajuan.

Bagaimanakah POLRI memanfaatkan program-program pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Kepolisian pada perguruan-perguruan tinggi di luar negeri?

Tidak banyak perwira POLRI dalam masa lampau memperoleh kesempatan untuk belajar di perguruan-perguruan tinggi di luar negeri selama jangka waktu yang cukup lama untuk sungguh-sungguh mendapat pengetahuan keahlian tambahan yang berarti, yang menjadikan perwira-perwira yang bersangkutan sungguh-sungguh ahli berkenaan dengan bidang-bidang pengetahuan keahlian tertentu. Seluruh kepolisian Indonesia sekarang ini hanya mempunyai satu tenaga ahli tingkat Doktor dan sejumlah sangat kecil tenaga ahli tingkat Magister atau M.A. Di Mesir, negeri yang lebih kecil dari Indonesia dengan penduduk yang jauh lebih sedikit daripada jumlah penduduk di negeri kita, terdapat sekitar 30 tenaga ahli tingkat Doktor di kepolisiannya, orang-orang Mesir yang kebanyakan memperoleh gelar Doktor di luar negeri.

Seperti halnya dengan TNI Angkatan Darat, serta juga Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia; Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada; Institut Pertanian Bogor; dan Institut Teknologi Bandung, POLRI-pun harus berusaha memanfaatkan perguruan-perguruan tinggi Ilmu Kepolisian di luar negeri, seperti Polizei Fuhrungsakademie di Munster, Jerman; Ecole Nationale Superieure de Police di Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Perancis; Police College di Basington, Inggris; Nederlandse Politie Academie di Apeldoorn, Nederland; John Jay College of Criminal Justice,

City University of New York; Department of Police Administration, Indiana University; Department of Police Science and Administration, California State University at Los Angeles; dan berbagai universitas lain yang menyelenggarakan program-program pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Kepolisian, Kriminologi, Kriminalistik, dan cabang-cabang tertentu dari Ilmu Kepolisian maupun dalam bidang-bidang bantuan seperti Sosiologi, Antropologi Hukum, Ilmu Kedokteran, dan Pengetahuan Hukum di Amerika Serikat; serta berbagai pusat pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Kepolisian di negara-negara lain. Kita harus berusaha memanfaatkan sekalian sumber-sumber pengetahuan ini.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-Saudara yang saya hormati.

35 tahun telah berlalu sejak perguruan tinggi ini, yang sekarang dikenal sebagai Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan yang lebih dikenal sebagai PTIK, didirikan di Magelang. Sekarang, marilah kita kaji dengan seksama perubahan-perubahan apa yang perlu diadakan dalam usaha besar pengembangan tenaga-tenaga ahli dalam bidang Ilmu Kepolisian di negeri kita dan bersama-sama mengusahakan perubahan-perubahan dan pengembangan yang diperlukan agar kepolisian negara kita dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang makin lama makin banyak dan makin lama makin tinggi dari masyarakat kita di masa yang akan datang.⁸⁾

Jayalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian! Jayalah Kepolisian Republik Indonesia! Jayalah Negara kita, Republik Indonesia!

Jakarta, Juni 1981

Harsja W. Bachtiar
Dekan PTIK

8) Lihat Awaloedin Djamin, Laporan KAPOLRI dalam RAPIM ABRI 1981 (Jakarta: Markas Besar, Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Pertahanan-Kemampuan, 1981).



